

ANTARA

Membangun Karakter Masyarakat Bali



IMLEK JADI MOMENTUM KOLABORASI DAN TOLERANSI

PEMKAB BADUNG
DUKUNG MASYARAKAT
LESTARIKAN
SENI BUDAYA



Hal. 7

KPU BALI SEBUT
PPS PEREMPUAN
DI BANGLI LEBIH
DARI 30 PERSEN



Hal. 16

HAL
3

Destinasi Wisata di Bali Jadi Zonasi Penerapan Kendaraan Listrik

Gubernur Bali Wayan Koster mengarahkan daerah wisata di "Pulau Dewata" --sebutan untuk Bali-- agar dijadikan zonasi penerapan penggunaan kendaraan listrik.

"Banyak manfaatnya pakai kendaraan listrik dan harus betul-betul masyarakat didorong, dari zonasi misalnya di Nusa Penida, Ubud, Kuta, jadikan zona dan lakukan pendekatan," kata dia di Denpasar, Kamis.

Usai peluncuran Rencana Aksi Daerah Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, ia menegaskan zonasi harus segera dilakukan dengan daerah wisata sebagai permodelannya.

Selain daerah wisata, ia menargetkan Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, dan Karangasem sebagai kabupaten/kota untuk penerapan penggunaan kendaraan listrik, lantaran daerah tersebut terkenal padat dan berpotensi menjadikan Bali paling cepat dalam mencapai emisi nol.

Selain pembentukan zonasi

untuk mendukung percepatan penerapan kendaraan listrik di Bali, Koster juga menyarankan pembentukan kerja sama dengan BPD Bali dalam hal pemberian cicilan yang lebih murah dan waktu lebih lama.

"Kemudian juga pajaknya lebih ringan. Parkir, kalau kendaraan listrik bisa parkirnya bebas. Jadi hal-hal konkret yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat akan mendorong masyarakat untuk berubah," ujar dia.

Orang nomor satu di Pemprov Bali itu, bahkan berencana mendorong pemberian insentif bagi pelaku usaha di bidang transportasi listrik karena turut mengampanyekan transisi energi tersebut.

Di lingkup Pemprov Bali, Koster merencanakan adanya



Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan arahan pembentukan zona daerah wisata dalam peluncuran Rencana Aksi Daerah Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Denpasar, Kamis (26/1/2023). ANTARA/Ni Putu Putri Muliartari

penggunaan kendaraan listrik bagi pegawai sebagai upaya menggerak masyarakat turut terlibat.

Apabila upaya-upaya tersebut dilakukan, katanya, target Bali nol emisi di 2045 dapat tercapai bahkan pada 2030.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta menyampaikan beberapa daerah wisata yang dirancang sebagai

zona penerapan kendaraan listrik adalah kawasan ITDC Nusa Dua, Sanur, dan Ubud.

"Untuk Nusa Penida akan dimulai dari Nusa Ceningan dan Lembongan, sudah itu Pura Besakih yang memang bukan wisata tapi konsep spiritual yang akan dimulai tahun ini kira-kira April sudah pakai shuttle listrik," kata dia. (ant)

Dispar Bali Promosikan 66 Kegiatan Dalam Calendar of Event 2023



Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemaayun (tengah) saat meresmikan Calendar Of Event 2022 di Denpasar, Selasa (17/1/2023). ANTARA/Ni Putu Putri Muliartari

KEPALA Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali Tjok Bagus Pemaayun mempromosikan 66 kegiatan sepanjang 2023 melalui peresmian Calendar Of Event (COE) 2023.

"Memang cakupannya (COE 2023) untuk promosi bahwa Bali memiliki berbagai event (kegiatan). Kami lihat momentum ini tepat

setelah PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) dicabut, jadi kalau di Bali ada event, wisatawan akan merencanakan bulan apa akan datang ke sini," kata dia di Denpasar, Selasa.

Dalam Calendar Of Event 2023, Tjok Bagus telah menyusun kegiatan berdasarkan waktu pelaksan-

aannya, di mana seluruh kegiatan terdiri dari 51 event budaya, 13 event minat khusus atau sport dan 2 event MICE.

"Sebenarnya masih ada banyak event yang belum tercatat karena kurangnya informasi dari penyelenggara. Saya harap, ada informasi lebih awal dan lebih jelas terhadap pelaksanaan event-event yang ada di Bali, sehingga bisa kita promosikan bersama-sama sebagai bagian dari daya tarik pariwisata Bali," ujarnya.

Adapun upaya mengenalkan ke-66 event tersebut kepada wisatawan adalah melalui media elektronik, Tjok Bagus juga menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan KBRI seluruh dunia.

"Kami sampaikan event ini melalui KBRI semua termasuk memanfaatkan 13 Vito. Vito adalah representatif dari Kemenparekraf, itu harus dimanfaatkan oleh

dinas pariwisata provinsi seluruh Indonesia, dan kami Bali tentu memanfaatkan betul," kata dia.

Untuk minat wisatawan mancanegara sendiri, diakui masih condong ke event budaya, karena Bali dikenal sebagai pariwisata berbasis budaya.

Namun, pejabat Pemprov Bali itu menyampaikan bahwa Gubernur Wayan Koster memberi arahan agar ke depannya selain budaya, wisatawan juga tertarik dengan wisata kesehatan dan kebugaran, MICE, dan olahraga.

Tjok Bagus menyebut umumnya event yang masuk dalam daftar CEO 2023 merupakan kegiatan tahunan seperti Pesta Kesenian Bali, Denpasar Festival, Maybank Marathon dan Ubud Food Festival, namun ada pula kegiatan baru seperti Indonesia Time To Speak Up yang akan berlangsung Mei 2023. (ant)

Disdukcapil Denpasar Edukasi OPD Soal Identitas Kependudukan Digital

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar, Bali, mengencarkan sosialisasi identitas kependudukan digital di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah kota setempat agar segera dapat diaplikasikan.

"Kami intensif melakukan sosialisasi guna mengedukasi seluruh staf di lingkungan OPD Pemkot Denpasar," kata Kepala Disdukcapil Kota Denpasar Dewa Gde Juli Artabrata di Denpasar, Kamis.

Menurut dia, dengan sosialisasi tersebut diharapkan para ASN dapat memahami dan dapat mengaplikasikan identitas kependudukan digital.

"Dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui aplikasi identitas kependudukan digital, antara lain kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK)," ujarnya.

Sedangkan untuk data balikan yang bisa diakses adalah kartu vaksin, NPWP, kepemilikan kendaraan, data kepegawaian BKN, dan daftar

pemilih tetap (DPT).

Seperti diketahui, katanya, identitas kependudukan digital adalah aplikasi berbasis android yang berisi informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

"Tujuan dari penerapan identitas kependudukan digital untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan," ucapnya.

Termasuk, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk, mempermudah, dan mempercepat transaksi



Sejumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar saat mencoba menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital dalam kegiatan sosialisasi di Denpasar, Kamis (19/1/2023). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

pelayanan publik (privat) dalam bentuk digital.

Artabrata menambahkan kegiatan sosialisasi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko

Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

"Keamanan kepemilikan identitas kependudukan digital melalui sistem autentifikasi untuk mencegah pemalsuan dan kebocoran data menjadi tujuan dalam program digitalisasi ini," katanya. **(ant)**

Wali Kota Denpasar Sebut Imlek Jadi Momentum Kolaborasi dan Toleransi



Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menghadiri perayaan "Imlek Toleransi" di Denpasar, Senin (23/1/2023). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

WALI Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan perayaan Imlek menjadi momentum kolaborasi dan toleransi antarumat beragama di Ibu Kota Provinsi Bali itu.

"Ini merupakan implementasi spirit kolaborasi dan toleransi dalam menjaga keberagaman," kata Jaya Negara saat menghadiri perayaan "Imlek Toleransi" di Jalan

Gajah Mada Denpasar, Senin sore.

Menurut dia, berbagai kebudayaan dari etnis yang ada di Denpasar dapat semakin meningkatkan daya tarik pariwisata di kota ini sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca-pandemi COVID-19.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Denpasar sangat fokus dalam merangkul keberagaman

yang dapat memperkaya Kota Denpasar sebagai kota berbudaya dalam spirit Vasudhaiva Kutumbakam atau menyama braya (persaudaraan) dan meneguhkan Denpasar sebagai kota toleransi.

Kegiatan tersebut diprakarsai I Ketut Siandana, AA Ngurah Jaka Pratinjaya, dan Jro Mangku Gede Kuning yang bernaung di bawah Bahan Komunitas Bali Tionghoa Nusantara.

"Perayaan 'Imlek Toleransi' kami fokuskan untuk doa-doa, prosesi, sujud syukur sebagai makna utama perayaan Imlek, yang tentunya bermuara pada kemakmuran bersama," ujarnya.

Siandana menambahkan, rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek di Kota Denpasar diawali dengan ritual di Pelinggih Ratu Gede Syahbandar di Puri Agung Jro Kuta, ritual di Pelinggih Dewi Kwan Im di Pura Taman Sari. Dilanjutkan dengan ritual mengawali parade di Konco Sing Bie Bio Jalan Kartini.

Iring-iringan parade diawali dengan ritual menyalakan petasan, dilanjutkan dengan memohon restu di Pura Desa Denpasar.

Setelah itu rangkaian bergerak ke Kawasan Patung Catur Muka untuk selanjutnya kembali ke Kawasan Ratu Mas Melanting, Pelataran Pasar Badung Denpasar.

Kemudian, di kawasan pelataran Pasar Badung juga dipentaskan beragam garapan budaya, seperti Barong Sai, Liong, Tari Baris Cina, dan Bala Ngarebeg dari Naluri Manca.

Ada pula garapan tari dari Pancar Langit yang menggabungkan Kukus Arum, Barong Landung, dan Lango Dewi. Selain itu, turut dimeriahkan penampilan Agung Ocha, Gus Wicak, dan Gede Kurniawan.

"Kami berharap kegiatan ini menjadi momentum toleransi serta memupuk kebersamaan untuk saling mendoakan menuju kemakmuran bersama," ujarnya. **(ant)**

Menteri ATR/BPN Tetapkan Denpasar Jadi Kota Lengkap Pertama di Indonesia

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menetapkan predikat 'Kota Lengkap' pertama di Indonesia kepada Kota Denpasar, Bali.



secara tekstual adalah spasial peta itu tidak ada tumpang tindih dari bidang satu ke lainnya," jelasnya.

Selain itu, secara tekstual dari bidang satu dengan lainnya dilihat tak ada jarak, atau seluruh bidangnya rata seperti yang terlihat dalam peta.

Sementara itu, secara yuridis predikat Kota Lengkap diberikan apabila buku tanah maupun surat ukur dari bidang tanah yang ada dapat diunggah ke dalam sistem milik BPN.

"Sekarang digitalisasi, kalau itu bisa masuk dan akurat, maka persyaratan Kota Lengkap ini sudah terpenuhi," ujarnya.

Kepada kota-kota yang nantinya dapat menyusul Kota Denpasar meraih predikat ini, Menteri ATR/BPN sampaikan bahwa terdapat keuntungan dari penetapan itu.

Keuntungan tersebut diantaranya adalah kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan

Di Denpasar, Kamis, Hadi menjelaskan bahwa wilayah yang mendapat predikat Kota Lengkap artinya di wilayah tersebut kini memiliki sertifikat kepastian hukum, sehingga nilai tanahnya naik. "Saya dan Gubernur Bali mendeklarasikan Kota Denpasar dengan predikat Kota Lengkap, jadi kota yang pertama di seluruh Indonesia, ada 514 kabupaten/kota, dan Denpasar adalah yang pertama," kata dia kepada media.

Hadi menjelaskan bahwa Kota Lengkap memiliki sejumlah kriteria, seperti sudah adanya pemetaan dari tingkat desa, kecamatan, hingga kota.

"Semua sudah terdaftar baik secara tekstual maupun yuridis,



Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto saat mendeklarasikan Denpasar sebagai Kota Lengkap di Denpasar, Bali, Kamis (26/1/2023). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari/wsj.

tanah, karena telah menggunakan sistem digital.

"Masyarakat bisa menggunakan sertifikatnya untuk usaha dengan memasukkan hak tanggungan, bisa melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian seperti UMKM dan masyarakat juga tenang karena memiliki kepastian hukum atas tanahnya," kata Hadi.

Selain itu, investor akan dimu-

dahkan dalam memiliki kepastian hukum apabila menanamkan investasinya di Kota Lengkap, serta menutup kesempatan bagi mafia tanah karena seluruh tanah telah terdaftar di BPN masing-masing kantor wilayah. Selain Kota Denpasar, Menteri ATR/BPN itu menandatangani deklarasi Kota Lengkap ke daerah lainnya seperti Bontang, Madiun dan Bogor. (ant)

Parade Barongsai Meriahkan Festival Imlek Bersama di Denpasar



Paulus Herry Arianto selaku Ketua Panitia Acara Festival Imlek Bersama 2023 bersama Ketua INTI Bali Putu Agung Prianta dan jajarannya berdiri di depan gapura China yang terletak di kawasan Jalan Gajah Mada-Patung Catur Muka Denpasar, Selasa (17/1/2023). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

PARADE Barongsai, Parade Wushu, Festival Kuliner dan sejumlah agenda lainnya akan memeriahkan rangkaian Festival Imlek Bersama 2023 di Kota Denpasar, Bali, pada 28-29 Januari 2023.

"Ada dua acara utama dalam Festival Imlek Bersama 2023 ini yaitu Parade Nusantara dan

Panggung Nusantara," kata Paulus Herry Arianto selaku Ketua Panitia Acara Festival Imlek Bersama 2023 di Denpasar, Selasa.

Festival Imlek Bersama 2023 yang mengangkat tema Merajut Kebhinnekaan Memperkuat Kerukunan ini akan dipusatkan di kawasan Jalan Gajah Mada, Kawasan Patung Catur Muka, dan

Lapangan Puputan Badung yang merupakan jantung Kota Denpasar.

Sebelum dilaksanakan festival tersebut juga sudah terpasang gapura khas China dan 1.200 lampion. Gapura dan lampion ini terpasang di sepanjang Jalan Gajah Mada Denpasar hingga menuju Lapangan Puputan Badung.

Paulus Herry menambahkan, melalui acara Festival Imlek Bersama 2023 ini tidak saja menampilkan kebudayaan Tionghoa tetapi juga dikolaborasi dengan Parade Budaya Nusantara lainnya, termasuk akulturasi kebudayaan China dengan Bali.

Parade Imlek Bersama 2023 itu, lanjut dia, sebagai momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi dan mempererat kebersamaan khususnya keturunan Tionghoa di Bali.

"Harapan kami, semua masyarakat bisa menikmati festival ini dan sekaligus bentuk toleransi. Kami sangat bangga

sebagai orang yang tinggal di Bali dengan berbagai kebhinnekaannya," ujarnya.

Kemudian Denpasar sebagai Kota Toleransi diharapkan pada 2023 dan seterusnya akan membawa harapan dan rezeki baru bagi semua.

Parade Nusantara pada 28 Januari 2023 akan digelar dengan rute dari Jalan Gajah Mada Denpasar menuju kawasan Patung Catur Muka dan berakhir di Lapangan Puputan Badung.

Parade Nusantara ini dijadwalkan dimulai dari pukul 16.00 Wita yang akan dibuka oleh Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara beserta jajaran Forkopimda Denpasar.

Sekitar 1.200 peserta akan ikut dalam Parade Nusantara ini. "Hingga saat ini sudah terdaftar 200 orang dari sembilan paguyuban yang akan mengikuti parade barongsai, dan juga ada 200 peserta akan mengikuti parade wushu," ucapnya. (ant)

Pemkab Badung Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Warga

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali siap untuk melakukan berbagai upaya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Badung.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa terkait dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. "Ini menjadi catatan yang akan kami terjemahkan di Badung. Kami tidak hanya akan melakukan upaya perbaikan ekonomi masyarakat tetapi pertumbuhan ekonomi kami jamin akan lebih baik ke depan di balik tantangan global," ujar Wabup Suiasa dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Selasa.

Pada kegiatan itu Presiden Jokowi mengingatkan seluruh kepala daerah dan pemangku kebijakan di Indonesia berhati-hati

dengan ancaman resesi.

Menurut Wabup Ketut Suiasa, Presiden Jokowi memberikan arahan agar pemerintah daerah bisa membangun kolaborasi dengan berbagai elemen untuk mampu mengendalikan inflasi di daerah.

Untuk itu pihaknya di Badung baik jajaran birokrasi maupun di pelaku ekonomi akan menerapkan prinsip digitalisasi dan melakukan transformasi serta inovasi di sektor ekonomi termasuk hilirisasi yang dapat dilakukan di masing-masing daerah.

Pemkab Badung juga akan melakukan variasi berbagai produksi dan inovasi yang dimiliki agar bisa sesuai dengan karakteristik potensi dan ciri khas tersendiri yang dimiliki.

"Hal itu menjadi catatan penting bagi daerah agar ditindak lanjuti, bahkan Bapak Presiden juga mengarahkan bagaimana setiap daerah memiliki satu ikon yang disebut kota yang tematik termasuk di dalamnya produk yang tematik," kata dia.



Wabup Badung I Ketut Suiasa (kedua dari kiri) saat menghadiri Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Bogor Jawa Barat, Selasa (17/1). ANTARA/HO-Pemkab Badung

la menambahkan tantangan ke depan akan dihadapkan dengan krisis finansial, krisis politik, krisis energi dan pangan yang akan memberikan dampak yang sangat besar kepada seluruh daerah di Indonesia.

"Khusus kami di Bali dan

Badung yang sangat bergantung pada pariwisata yang artinya kami sangat bergantung pada kedatangan wisatawan, ketika terjadi krisis ini semua akan berpengaruh pada sektor pariwisata," pungkas Wabup Ketut Suiasa. (adv)

620 Peserta Ikuti Seleksi PPPK Guru di Kabupaten Badung



Pelaksanaan seleksi kompetensi CAT-UNBK PPPK Guru dari pelamar umum di SMPN 2 Kuta Utara Dalung, Badung. ANTARA/HO-Pemkab Badung.

SEBANYAK 620 peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dari pelamar umum di Kabupaten Badung, Bali.

Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura,

Rabu, menjelaskan di wilayahnya terdapat 2.261 formasi tenaga guru PPPK, namun yang berhak mengikuti seleksi sebanyak 2.500 orang lebih dan telah dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu prioritas 1 prioritas 2 dan prioritas 3, diikuti oleh 1.800

orang lebih.

"Hari ini untuk prioritas 4 dan diikuti oleh 620 orang terbagi di dua tempat yaitu SMP 1 dan SMPN 2 Kuta Utara. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan yang aman dan lancar akan mempercepat keluar hasilnya nanti," ujar dia.

la berharap melalui pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK Guru untuk pelamar umum itu Pemkab Badung bisa segera mendapatkan tenaga guru dengan status yang jelas yaitu sebagai Aparatur Sipil negara (ASN) mengingat saat ini guru berstatus ASN di Badung jumlahnya sangat terbatas.

"Kami berharap kepada pemerintah pusat akan mempertimbangkan terus hal seperti ini terutama untuk tenaga lain, sekarang untuk guru mungkin dalam tahun ini juga kita menyiapkan tenaga kesehatan. Sehingga ada ruang untuk teman-teman yang

selama ini mengabdikan di Badung bisa diangkat menjadi ASN melalui PPPK," kata dia.

la menambahkan sesuai arahan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Pemkab Badung ingin semua pegawai yang belum berstatus ASN bisa didorong menjadi PPPK, namun saat ini masih terkendala dengan regulasi.

"Pada prinsipnya sesuai arahan Bupati ketika menugaskan saya bersama tim ke MenPAN-RB beliau malah ingin agar semuanya bisa masuk tapi kita dibatasi oleh regulasi, mudah-mudahan ke depannya semua keinginan Bupati bisa terakomodir semuanya," pungkas Adi Arnawa.

Seleksi kompetensi terhadap 620 peserta umum itu dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test Ujian Nasional Berbasis Komputer (CAT-UNBK). (adv)

Pemkab Badung Mulai Program Alokasi Anggaran Kelurahan Pada Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Badung Bali akan memulai program Alokasi Anggaran Kelurahan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan kelurahan di wilayahnya pada tahun 2024 mendatang.

"Pembangunan kelurahan juga akan ikut menentukan keberhasilan Badung dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Badung Tahun 2021-2026" ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Kamis

Pada program itu Pemkab Badung melalui APBD Kabupaten Badung Tahun 2024 akan merencanakan pemberian Alokasi Anggaran Kelurahan kepada seluruh kelurahan di wilayah Badung sebagai bentuk dukungan pendanaan terhadap keberlanjutan pembangunan di kelurahan.

Untuk itu Pemkab Badung juga telah melaksanakan Sosialisasi Alokasi Anggaran Kelurahan di

Kabupaten Badung Tahun 2024 untuk memajukan pembangunan di lingkup kelurahan di Badung.

Menurut Sekda Adi Arnawa sesuai dengan kebijakan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, rencananya akan dialokasikan anggaran kepada kelurahan tahun 2024 sebesar minimal Rp10 miliar, dengan arah penggunaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

"Kami harap masing-masing kelurahan untuk mengawal, mulai tahap awal perencanaan melalui Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Januari 2023," tambah dia.

Ia menjelaskan usulan dan aspirasi yang diakomodir kepala lingkungan di masing-masing kelu-



Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa melakukan Sosialisasi Alokasi Anggaran Kelurahan. ANTARA/HO-Pemkab Badung

rahan, nantinya akan disampaikan oleh lurah melalui Musrenbang.

"Dari hasil Musrenbang itu akan disampaikan atau diusulkan pada Murenbang kecamatan yang sekaligus dijadikan bahan yang nantinya akan disampaikan pada Musrenbang SKPD Kabupaten," ujar Sekda Adi Arnawa.

Sekda Adi Arnawa menambahkan alokasi anggaran kelurahan di Badung Tahun 2024 pada dasarnya merupakan stimulus un-

tuk mendorong adanya peran aktif dan swadaya masyarakat kelurahan guna ikut serta berkontribusi dalam pendanaan pembangunan kelurahan.

"Sehingga tujuan pembangunan kelurahan dapat tercapai lebih cepat, efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan Kelurahan tidak terlepas dari adanya sinergitas antara pemerintah daerah, swasta, masyarakat kelurahan," kata dia. (adv)

Pemkab Badung Jamin Seleksi Guru Transparan dan Objektif



Wabup Badung, Provinsi Bali, I Ketut Suiasa (tengah) meninjau pelaksanaan seleksi kompetensi CAT-UNBK P3K di SMPN 1 Kuta Utara, Kamis (19/1/2023). FOTO ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Provinsi Bali menjamin transparansi, objektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tes seleksi kompetensi Computer Assisted Test (CAT-UNBK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru bagi pelamar umum.

"Kami menjamin dari segi

objektivitas, akuntabilitas dari pada pelaksanaan tes P3K untuk para guru di Kabupaten Badung dapat dipertanggungjawabkan," kata Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat memantau pelaksanaan seleksi di SMPN 1 Kuta Utara, Badung, Kamis.

Ia mengatakan pelaksanaan seleksi yang dilakukan itu diharap-

kan dapat terlaksana secara maksimal untuk merekrut tenaga guru yang selama ini sudah mengabdikan untuk masyarakat, pemerintah dan negara dalam rangka meningkatkan, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

"Mudah-mudahan pelaksanaan seleksi ini bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai mekanisme peraturan yang berlaku," katanya.

Wabup menjelaskan Pemkab Badung terus melaksanakan pemantauan pelaksanaan tes rekrutmen PPPK untuk para guru mulai dari hasil tes yang dilaksanakan dari Rabu (18/1) hingga tes CAT pada saat ini merupakan gelombang kedua.

Menurut dia Pemkab Badung akan terus mengacu kepada sistem maupun peraturan-peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan seleksi PPPK guru di wilayahnya.

"Upaya ini merupakan suatu

usaha bersama dan yang terpenting saya minta kepada para peserta agar memiliki keyakinan maupun kemampuan yang telah dimiliki," kata Ketut Suiasa.

Sebelumnya Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan pihaknya berharap agar Badung bisa segera mendapatkan tenaga guru dengan status yang jelas yaitu sebagai Aparatur Sipil negara (ASN) melalui seleksi PPPK itu mengingat saat ini guru berstatus ASN di Badung jumlahnya sangat terbatas.

"Kami berharap kepada pemerintah pusat akan mempertimbangkan terus hal seperti ini terutama untuk tenaga lain, sekarang untuk guru mungkin dalam tahun ini juga kita menyiapkan tenaga kesehatan. Sehingga ada ruang untuk teman-teman yang selama ini mengabdikan di Badung bisa diangkat menjadi ASN melalui PPPK," katanya. (adv)

Pemkab Badung Dukung Masyarakat Lestarikan Seni Budaya

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, terus mendukung upaya-upaya pelestarian seni dan budaya yang dilakukan masyarakat setempat.

Salah satu upaya pelestarian seni budaya yang didukung adalah pementasan pertunjukan seni berjudul "MahaAwidya" oleh para seniman Sanggar Seni Pancer Langit.

"Kami mengapresiasi kreativitas seniman Sanggar Seni Pancer Langit. Kami akan selalu mendukung setiap kegiatan apapun, terlebih dalam upaya pelestarian seni dan budaya," ujar Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Senin.

Ia mengatakan pertunjukan-pertunjukan seni budaya oleh para seniman lokal diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi pariwisata di Badung.

Selain itu, pelestarian seni budaya juga dinilai mampu menjaga pembangunan sektor pariwisata berkelanjutan sebagai sektor

utama yang diandalkan Kabupaten Badung.

Dalam pementasan seni Sanggar Seni Pancer Langit Sekda Adi Arnawa menilai pementasan telah dikemas dengan apik dengan alur cerita yang sangat mengalir dan menjadi satu kesatuan yang utuh dikemas dalam cerita MahaAwidya yakni ilmu pengetahuan yang sangat mulia.

"Awalnya kami membayangkan menonton pertunjukan dalam satu panggung, namun kami kaget ketika seolah-olah langsung diajak dalam pertunjukan tersebut, ditambah suasana Puri Rangka yang begitu klasik.

Ia menambahkan pertunjukan seni yang luar biasa itu dapat ditampilkan tidak terlepas dari ide kreatif dari seluruh seniman, penanggung jawab dan pengurus sanggar-sanggar seni.

"Dinas terkait baik itu Dinas Kebudayaan maupun Dinas Pariwisata mendukung Sanggar Seni Pancer Langit sehingga pertunju-



Pertunjukan seni berjudul "MahaAwidya" yang dipentaskan oleh para seniman Sanggar Seni Pancer Langit. ANTARA/HO-Pemkab Badung

kan ini dapat dijadikan daya tarik wisata," ungkap Sekda Adi Arnawa.

Penanggung jawab Sanggar Seni Pancer Langit A.A. Gede Agung Rahma Putra menambahkan pelestarian seni budaya sebagai suatu identitas masyarakat Bali harus dipertahankan dan perlu pengembangan sebagai suatu kreativitas

yang harus digali terus-menerus.

"Dari pertunjukan ini diharapkan dapat dijadikan agenda rutin sehingga dapat menjadi daya tarik pariwisata. Kami mencoba menawarkan suatu konsep pertunjukan baru bernuansa Bali untuk menarik kunjungan wisatawan," ujar dia. (adv)

Pemkab Badung Yakin PPS Bekerja Maksimal Untuk Pemilu Berkualitas



Pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota PPS Pemilu 2024 di Kabupaten Badung, Bali. ANTARA/HO-Pemkab Badung.

BUPATI Badung, Bali I Nyoman Giri Prasta menyakini anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang baru dilantik di wilayahnya akan bekerja maksimal guna pelaksanaan Pemilu tahun 2024 yang berkualitas.

"Saya meyakini bahwa dengan pengalaman dan kemampuan sumber daya manusia penyeleng-

gara pemilu di Badung dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya maka kami memiliki bekal yang lebih dari cukup untuk mempersiapkan Pemilu yang jauh lebih baik dan berkualitas," ujar Bupati Giri Prasta di kawasan Kuta, Badung, Selasa.

Ia mengatakan kualitas pemilihan umum merupakan pondasi

politik yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Untuk itu suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 menurutnya bukan saja menjadi tugas dari penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu dan DKPP semata, tetapi merupakan tugas semua pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Badung dan seluruh komponen masyarakat.

Pihaknya di pemerintahan Badung juga siap dalam memberikan dukungan moral, finansial dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan "Kami semua memiliki kepentingan yang sama agar Pemilu serentak tahun 2024 berjalan dengan aman dan damai, serta berkualitas dan berintegritas," kata dia.

Bupati Giri Prasta menjelaskan penyelenggaraan pemilihan umum juga wajib menjamin tersalurkannyanya suara rakyat secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Di sisi yang lain, penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip-prinsip mandiri, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

"Oleh karena itu ini merupakan kewajiban kita semua untuk mewujudkan cita-cita luhur dari amanat undang-undang tersebut," ungkap dia.

Ketua KPU Kabupaten Badung Wayan Semara Cipta menambahkan saat ini jumlah penduduk Kabupaten Badung sebanyak 517 ribu jiwa yang membuat kuota kursi DPRD Badung mengalami kenaikan dari 40 kursi menjadi 45 kursi pada tahun 2024.

"Kami sebagai penyelenggara pemilu bertugas sebagai pembawa kebaikan dan berkontribusi untuk kebaikan dalam menyelenggarakan pemilu khususnya bagi Kabupaten Badung tercinta," tambah dia. (adv)

Pemkab Badung Minta Keuangan Desa Dikelola Transparan dan Akuntabel

PEMERINTAH Kabupaten Badung Bali meminta keuangan desa harus terus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Mangupura, Selasa mengatakan paradigma desa membangun menjadi fokus perhatian Pemkab Badung melalui penyerahan alokasi dana perimbangan keuangan dan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa.

"Mengingat besarnya potensi sumber daya manusia dan sumber dana yang dimiliki dan diserahkan kepada desa, maka itu perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik," kata dia.

Ia mengatakan Badung telah diberikan predikat Kabupaten Mandiri, Desa Mandiri oleh pemerintah pusat maka predikat itu harus dipertahankan dengan

baik melalui evaluasi dan terus disempurnakan.

"Jadi kepala desa dan perangkat desa memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan, dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban," ujar Bupati Giri Prasta.

Bupati Giri Prasta menambahkan dalam rangka mendukung kinerja pemerintahan desa, pihaknya juga mendorong dan memperjuangkan kejelasan status perangkat yang ada di pemerintah desa baik itu Kaur, Kasi dan Kelian Banjar Dinas

"Ini yang akan kami perjuangkan apakah bisa statusnya jadi PNS, PPPK atau sebagainya. Di situ juga ada tenaga kontrak yang tidak termasuk perangkat desa, ketika nanti kedepannya ada Kasi yang pensiun, mengingat pegawai kontrak yang ada sudah dilatih di



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. ANTARA/HO-Pemkab Badung

kader biar bisa direkrut di situ, tidak lagi melalui perekrutan pendaftaran," ungkap dia.

Sementara Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung Komang Budhi Argawa menjelaskan dana transfer dalam APBDES (PBH, DD, ADD) Tahun 2023 pagunya sebesar Rp560.831.514.125.

Dana desa terbanyak ada di Desa Pelaga sebesar Rp18.132.279.798, dana desa terkecil ada di Desa Kuwum sebesar Rp9.655.349.144. Sementara dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, pagu pajak daerah sebesar Rp463.004.749.310. (adv)

Pemkab Badung Gelar Rapat Koordinasi Dengan Tim Bantuan Hukum



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (kiri) memberikan pengarahan saat rapat koordinasi dengan tim bantuan hukum. ANTARA/HO-Pemkab Badung/ws.

PEMERINTAH Kabupaten Badung Bali menggelar rapat koordinasi dengan tim bantuan hukumnya untuk membahas dan menindaklanjuti permasalahan hukum yang ada guna menjaga wibawa pemerintah daerah dalam bidang hukum.

"Seperti terkait dengan permasalahan yang ada di kawasan

Ungasan Badung, jangan sampai Pemkab Badung bisa dikalahkan oleh kelompok tertentu, itu sangat buruk bagi kami," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Mangupura, Jumat.

Ia mengatakan dalam kesempatan itu pihaknya melakukan koordinasi terkait penyelesaian sengketa hukum melalui proses

litigasi atau proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Selain itu bersama dengan tim bantuan hukum Pemkab Badung juga membahas penyelesaian sengketa hukum melalui non-litigasi atau proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Bupati Giri Prasta menjelaskan penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan Pemkab Badung pasti akan menimbulkan eksekusi dengan pihak ketiga.

Namun upaya penyelesaian sengketa hukum ini harus tetap dilakukan untuk menjaga marwah dan wibawa Pemerintah Kabupaten Badung di mata publik.

"Kami tidak akan ambil pusing akan dampak hubungan yang mungkin jadi tidak harmonis dengan pihak-pihak lain, akibat dari penyelesaian

sengketa hukum yang ditempuh oleh Pemkab Badung," kata dia.

Hal itu karena menurutnya apabila permasalahan-permasalahan hukum sampai dibiarkan, pihak lain nantinya dikhawatirkan bisa melakukan tindakan yang sama.

"Ini kami harus tegak lurus, sehingga apa yang kami lakukan ini masyarakat Bali bahkan nasional tahu semuanya, ini bukan persoalan saya pribadi, ini adalah persoalan Pemkab Badung. Untuk itu lakukan ini dengan baik, saya tidak akan berpikir tentang hubungan, sepanjang kami berbuat baik dan benar saya kira tidak masalah," tambah Bupati Giri Prasta.

Ia mengungkapkan melalui penyelesaian sengketa hukum, pihaknya sebenarnya ingin meluruskan sistem yang sudah baik, agar oknum-oknum yang terindikasi melakukan pelanggaran bisa diluruskan. (adv)

Pemkab Badung Ajak Semua Pihak Atasi AIDS, TB dan Malaria

PEMERINTAH Kabupaten Badung Bali mengajak sejumlah pihak terkait untuk bersama-sama berkomitmen melakukan upaya penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) di wilayahnya.

"Berbagai elemen utamanya pemerintah, stakeholder dan perangkat desa di Badung harus bersatu padu dalam mensosialisasikannya ke masyarakat, karena kasus ATM ini harus kami tangani secara serius," kata Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa di Mangupura, Jumat.

Ia mengatakan penanggulangan kasus penyakit seperti AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Badung tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah, untuk itu perlu adanya kerja sama dari berbagai stakeholder pemerintah dan elemen masyarakat.

Untuk itu guna menekan kasus ATM, masyarakat harus lebih sering memproteksi diri dan mengedukasi diri dalam

hal dampak dari ketiga penyakit tersebut.

Menurut Wabup Suiasa kerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang penanganan juga perlu dilakukan baik itu untuk monitoring warga-warga baru atau yang berstatus penduduk sementara di daerahnya.

"Karena dalam penanganan ketiga penyakit menular ini, kami tidak bisa tangani sendiri. Tidak hanya dari pemerintah tapi harus juga berlanjut ke level tingkat desa," kata dia.

Kepala Dinas Kesehatan Badung Made Padma Pus-pita menjelaskan saat ini Dinas Kesehatan Badung bekerja sama dengan 11 rumah sakit diantaranya praktek dokter mandiri dan klinik-klinik swasta.

Nantinya semua akan bekerja sama dalam hal promotif untuk bisa mempromosikan kesehatan dan preventif dalam upaya pencegahan dan melakukan



Wabup Badung I Ketut Suiasa (kedua kiri) menyaksikan Penandatanganan kesepakatan bersama dalam penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Kabupaten Badung, Jumat (27/1). ANTARA/HO-Pemkab Badung

berbagai tindakan agar terhindar dari berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang.

"Selain itu upaya kuratif juga dilakukan sebagai suatu upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencegah penyakit menjadi

lebih parah melalui pengobatan," ungkap dia.

Ia menambahkan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bisa bersama-sama dalam menyamakan pola pikir, bagaimana bersinergi mengatasi dan memerangi ketiga penyakit menular itu. (adv)

Pemkab Badung Fasilitasi Kegiatan Positif Generasi Muda



Bupati Badung, Provinsi Bali, I Nyoman Giri Prasta memberikan motivasi kepada para pemuda yang tergabung dalam Sekeha Teruna Yowana Dharma Santhi. FOTO ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Provinsi Bali siap memfasilitasi berbagai kebutuhan yang dibutuhkan pemuda-pemuda yang tergabung dalam sekeha teruna yowana (kelompok pemuda di Bali) untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang positif.

"Kami selalu siap memfasilitasi kebutuhan sekeha teruna, dimana pemuda-pemuda ini adalah agen

perubahan yang paling baik dari sekarang untuk masa depan," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam keterangan di Mangupura, Minggu.

Ia mengatakan saat ini upaya yang paling penting dilakukan adalah untuk mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan para pemuda untuk menghindarkan mereka dari pengaruh hal-hal

negatif yang dapat merusak generasi bangsa.

"Yang paling penting bagi sekaa teruna dan anak-anak muda ini adalah agar mereka tidak mabuk-mabukan mengganggu ketertiban umum, tidak menggunakan obat-obatan terlarang narkoba," katanya.

Salah satu kegiatan kelompok pemuda yang didukung adalah kegiatan HUT Sekaa Teruna Yowana Dharma Santhi Ke-25 Banjar Kaja Jati di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Badung yang diisi dengan sejumlah kegiatan positif seperti berbagai perlombaan dan pelestarian seni budaya.

Bupati menjelaskan pihaknya bersama perangkat desa, bendesa atau Kepala Desa Adat Kutuh, serta masyarakat Kutuh akan menata Pantai Pandawa yang merupakan destinasi wisata andalan di kawasan itu.

Rencananya kelompok pemuda yang ada di kawasan itu masing-masing akan difasilitasi kios dan

akan diberikan juga penguatan modal. Hal itu dilakukan untuk mendorong kelompok-kelompok pemuda di kawasan itu agar bisa mandiri.

"Februari yang akan datang masterplan akan saya tandatangani untuk bisa digunakan bersama-sama. Untuk itu saya bersama tokoh-tokoh membuat infrastruktur agar dapat digunakan untuk generasi milenial yang akan datang," kata Giri Prasta.

Sementara itu Ketua Sekaa Teruna Yowana Dharma Santhi I Ketut Rai Suryawan menjelaskan para pemuda di kawasan itu memiliki semangat yang sama untuk bangkit setelah terdampak pandemi COVID-19.

"Kami berupaya agar bisa tangguh dan kukuh untuk bangkit kembali. Kami juga memohon bantuan ke Bupati Badung agar kami dibantu untuk bisa selalu melaksanakan kegiatan adat, seni dan budaya," katanya. (adv)

Pemkab Badung Optimalkan Pelaksanaan Vaksinasi Booster PMK

PEMERINTAH Kabupaten Badung Bali akan melakukan vaksinasi booster Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) untuk hewan ternak di wilayahnya secara maksimal untuk menekan angka penyebaran virus PMK.

"Kami di Kabupaten Badung akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi booster ini bersama seluruh tim serta menjalin kolaborasi dan sinergi dengan jajaran TNI/Polri serta pemangku kepentingan lainnya," ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam keterangannya di Mangupura, Minggu.

Ia mengatakan kerja sama dan upaya gotong-royong bersama oleh seluruh elemen itu diyakini akan membantu pencapaian target vaksinasi booster PMK.

Pihaknya menargetkan capaian vaksinasi booster PMK di Badung hingga bulan Juni mendatang dapat mencapai 80 persen dari total sasaran ternak yang rentan

terjangkit PMK.

Wabup Ketut Suiasa menjelaskan pada vaksinasi sebelumnya, Kabupaten Badung dapat mencapai target vaksinasi PMK sebesar 97 persen. Harapannya capaian tersebut bisa kembali diraih dalam pelaksanaan vaksinasi booster PMK untuk ternak sepanjang tahun ini.

"Mengingat apa yang kami lakukan terhadap vaksinasi PMK sebelumnya, kesuksesan kita luar biasa dimana Badung bisa mencapai 97 persen. Tentu target 80 persen ini merupakan target minimal yang harus bisa kami capai di bulan Juni tahun 2023," kata dia.

Ia menambahkan selain memaksimalkan kinerja tim vaksinasi bersama dengan stakeholder terkait partisipasi masyarakat khususnya peternak di Badung dinilai juga sudah sangat bagus dalam menyukseskan vaksinasi. Selain itu kinerja perangkat desa selama ini juga terpantau sudah



Wabup Badung I Ketut Suiasa (kedua kanan) meninjau Vaksinasi Booster PMK. ANTARA/HO-Pemkab Badung

turut membantu.

Menurutnya upaya bersama yang dilakukan berbagai pihak itu dilakukan karena Kabupaten Badung ingin memberikan kontribusi positif bagi suksesnya vaksinasi PMK secara nasional "Dengan demikian kami optimis dan yakin bahwa target yang

kami miliki ini akan dapat tercapai untuk pelaksanaan Vaksinasi Booster PMK di Badung," tambah Wabup Ketut Suiasa.

Di wilayah Bali kick off Vaksinasi Booster dalam penanganan PMK dipusatkan di wilayah Kabupaten Badung bertempat di Sentra Pembibitan Sapi Sobangan. (adv)

Sekda Badung Buka Seminar dan Pelantikan Bapena DPD PPNI Kabupaten Badung



Sekda Wayan Adi Arnawa membuka dan melantik Bapena DPD PPNI Kabupaten Badung periode tahun 2023-2026 di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Minggu (29/1).ANTARA/HO-Pemkab Badung

SEKDA Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri pelantikan Badan Penanggulangan Bencana Dewan Perwakilan Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (BAPENA DPD PPNI) Kabupaten Badung Periode Tahun 2023-2026 sekaligus membuka seminar di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Minggu (29/1).

"Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Badung memberikan apresiasi dan menyambut baik seminar seperti ini, dimana sebagai daerah pariwisata tentu langkah-langkah mitigasi, salah satunya terkait mitigasi kebencanaan harus menjadi prioritas kita, hal ini menjadi salah satu indikator Bali sebagai tempat wisata internasion-

al maupun wisatawan nusantara, yang berani berwisata ke Pulau Bali dan ke Kabupaten Badung khususnya. Oleh karena itulah maka, langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan berkolaborasi dan BPBD membentuk pengurus PPNI Kabupaten Badung merupakan langkah yang tepat dan strategis," ujar Sekda Adi Arnawa.

Ditambahkan Adi Arnawa, tantangan ke depan akan sangat beragam terlebih Bali, khususnya Badung yang PADnya bertumpu pada sektor pariwisata. Untuk menjaga pariwisata yang berkelanjutan perlu adanya langkah kedepan untuk pariwisata, yaitu mulai melakukan identifikasi tanpa meninggalkan akar budaya, seni dan adat istiadat dengan mencoba melakukan daya tarik yang berbeda, salah satunya health tourism.

Dalam rangka mewujudkan health tourism ini perlu didukung perangkat yang kuat dan siap dan

memiliki SDM yang kuat juga.

"Dengan dibentuknya sebuah organisasi Badan Penanggulangan Bencana, khususnya terkait dengan adanya Perawat yang ada di Kabupaten Badung, perlu menjadi nilai tambah buat kita khususnya Badung dalam memastikan bahwa wisatawan ini benar-benar siap untuk menerima siapapun yang mau datang ke Kabupaten Badung ini," katanya seraya berharap agar semua potensi yang dimiliki benar-benar disiapkan, termasuk salah satunya menyiapkan dari aspek penanggulangan bencana.

Sementara Ketua Panitia seminar Putu Purwita melaporkan BPBD sebagai leading sektor dan Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai Pembina dan Pengawas Organisasi di Bidang Kesehatan kegiatan yang bersinergi guna memudahkan dalam berkoordinasi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana. (adv)

Bupati Gianyar Serahkan Truk Sampah dan Rumah Pembibitan

PEMERINTAHAN Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali menyerahkan truk sampah kepada pengurus Desa Lebih dan Desa Kendran guna mendukung kegiatan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengangkutan sampah warga, sekaligus meresmikan rumah pembibitan yang dikenal sebagai Puspa Aman di Desa Lebih.

"Penyerahan truk sampah ke Desa Lebih dan Desa Kendran menunjukkan konsistensi Pemkab Gianyar untuk mengelola lingkungan terutama pengelolaan sampah berbasis sumber," kata Bupati Gianyar I Made Mahaystra, dalam siaran persnya Diskominfo Gianyar, Jumat.

Saat penyerahan truk, Bupati Mahaystra lebih menekankan pada kesiapan desa dalam penganggaran operasional armada pengangkutan. "Siapkan operasionalnya dengan baik di APBDes, karena truk perlu biaya yang lumayan tinggi. Mulai dari

biaya perawatan, bahan bakar dan tenaga pengangkut sampah termasuk supir," tutur Bupati.

Terlebih dia menekankan agar truk digunakan secara maksimal, dan jika tidak digunakan selama dua tahun maka Pemkab Gianyar akan menarik kembali bantuan tersebut untuk diserahkan ke desa lainnya. "Ini saya serahkan truk kebersihan, jika selama dua tahun tidak digunakan dengan baik, hanya parkir di garasi maka bisa saya tarik kembali. Namun jika dimanfaatkan dengan baik maka setelah dua tahun saya akan serahkan sepenuhnya ke-desa termasuk BPKB nya," tegas Bupati Mahaystra.

Ia juga berpesan agar kepala desa mensosialisasikan kebijakan pemilahan dan pengangkutan sampah dengan baik kepada masyarakat. "Mengingat merubah perilaku sangatlah sulit, maka diperlukan peraturan desa yang baik. Terlebih dibarengi dengan pararem adat yang ikut mengatur



Bupati Gianyar I Made Mahaystra sedang memperhatikan bunga Gumitir produksi rumah pembibitan atau Puspa Aman Desa Lebih. ANTARA/HO-Humas Pemkab Gianyar

pengelolaan sampah. Namun hal ini harus diawali dengan sosialisasi yang baik kepada masyarakat agar apa yang menjadi tujuan bersama bisa terwujud," pesannya.

Di samping memberikan truk kebersihan, sebagai program yang terintegrasi antara TPS3R dengan Puspa Aman dan Aku Hatinya

PKK, Bupati Mahaystra didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar Ida Ayu Surya Adnyani Mahaystra juga meresmikan Puspa Aman Desa Lebih. Dimana dalam Puspa Aman Desa Lebih terdapat rumah pembibitan, kebun bunga dan sayur mayur serta peternakan kambing. (ant)

Pemkab Tabanan Minta Anggota PPS Berintegritas Dalam Tugas Pemilu 2024



Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya (kanan) berbincang dengan anggota PPS saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Panitia Pemungutan Suara di Gedung Kesenian I Ketut Maria Tabanan, Selasa. ANTARA/HO-Pemkab Tabanan.

PEMERINTAH Kabupaten Tabanan, Bali meminta seluruh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan bertugas saat pelaksanaan Pemilu tahun 2024 untuk memiliki integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas wewenang serta kewajibannya.

"Ini adalah tugas berat yang harus dipikul oleh seluruh pihak, terutama anggota PPS sebagai ujung tombak pemilu di Desa," kata Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya saat menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Panitia Pemungutan Suara

di Gedung Kesenian I Ketut Maria Tabanan, Selasa.

Ia mengatakan Pemilu 2024 yang akan datang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat lima tahun ke depan yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesuksesan pemilu membutuhkan dukungan dan peran serta dari semua pemangku kepentingan dan tidak bisa hanya dilihat dari segi prosedural tetapi juga dari sisi substansial.

Dalam kesempatan itu, KPU Kabupaten Tabanan melantik 399 orang panitia pemungutan suara yang akan ditugaskan selama proses pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang.

"PPS yang berjumlah 399 orang harus memiliki integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas serta wewenangnya,

pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk melibatkan peran serta masyarakat, sehingga kesuksesan pemilihan umum tahun 2024 dapat tercapai," tambah Bupati Sanjaya.

Bupati Komang Gede Sanjaya berharap nantinya pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di wilayah Tabanan dapat berjalan dengan aman dan profesional.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, yakni Pemkab Tabanan, Jajaran Forkopimda, KPU, Bawaslu dan jajaran terkait lainnya agar selalu berkolaborasi dan bersama-sama mewujudkan hal tersebut.

"Saya yakin semua bagus dan solid karena KPU sudah luar biasa, Bawaslu sudah luar biasa, TNI dan Polri juga hebat-hebat, saya rasa tidak akan ada persoalan yang berarti dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang," pungkask dia. (ant)

Pemkab Bangli Minta PHDI Rawat Keharmonisan dan Kearifan Lokal

PEMERINTAHAN Kabupaten Bangli, Bali, meminta kepada pengurus Parisadha Hindu Darma Indonesia (PHDI) untuk selalu menjaga keharmonisan, kekompakan dan juga kearifan lokal yang selama ini menjadikan Bali sebagai destinasi wisata dunia.

Saat pelantikan pengurus PHDI Kecamatan se- Kabupaten Bangli di Pura Kehen Bangli, Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar berharap pengurus PHDI Kecamatan se- Kabupaten Bangli untuk selalu kompak sesuai harapan umat.

“Tetap menjaga toleransi antarumat beragama, menjaga kearifan lokal, berpedoman dengan norma dan aturan yang ada, sehingga harmonisasi kerukunan antar umat makin mengental, Bangli akan tetap aman dan terkendali,” kata Wabup Bangli dalam siaran pers Diskominfo Bangli, Jumat.

Ia menyatakan jika umatnya terkoordinir dengan baik, niscaya segala bentuk rongrongan atau budaya negatif yang masuk di

Kabupaten Bangli akan sirna dan terhalang dengan tembok kebinekaan dan keharmonisan umat yang ada.

Hadir pada acara tersebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bangli, Ketua PHDI Kab. Bangli, Majelis Desa Adat Kab. Bangli, Anggota Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan. Lurah Cempaga, Bendesa Adat Cempaga dan Kelian Adat Pekuwon.

Ketua PHDI Bangli I Nyoman Sukra menyampaikan dengan dilantiknya pengurus terpilih diharapkan mengerti akan tugas pokok dan perannya adalah membantu Pemerintah kabupaten Bangli dalam penyelenggaraan pembinaan umat.

“Pengurus parisadha tidak masuk dalam dunia politik ataupun pengurus partai tertentu. dan jika menjadi pengurus partai politik harus mengundurkan diri karena sudah tertuang di AD ART, pengurus parisadha harus netral.” tegasnya.



Pelantikan PHDI Bangli disaksikan oleh Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar. ANTARA/HO-Humas PHDI Bangli

Terkait banyaknya aliran kepercayaan yang dianut sebagian masyarakat, Nyoman Sukra minta kepada pengurus menjaga jangan sampai aliran kepercayaan asing menyusup ke parisadha sebab akan meracuni kepercayaan umat.

“Dan jangan dikucilkan Semeton hindu yang kena aliran asing karena kewajiban kita harus merangkul

dan menyadarkan mereka kembali ke jalan yang benar dan, itu baru niat yang mulia” pungkasnya.

Pelantikan ini diawali rangkaian upacara mejaya jaya yang diikuti oleh pengurus terpilih PHDI Kecamatan se-Kabupaten Bangli dan dipuput oleh Ida Peranda Gede Putra Manuaba Griya Gede Brahmana Bukit Bangli. (ant)

Bupati Klungkung Minta PPS Bekerja Maksimal untuk Pemilu Berkualitas



Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta memberikan sambutan dalam acara pelantikan, pengambilan sumpah janji dan bimbingan teknis badan ad hoc Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Klungkung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Klungkung, Selasa (24/1). ANTARA/HO-Dokumentasi Humas Pemkab Klungkung/ANTARA/HO-Pemkab Buleleng

BUPATI Klungkung I Nyoman Suwirta meminta 177 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Klungkung membuat terobosan baru dan menghasilkan tahapan pemilu yang berkualitas di 53 desa dan enam kelurahan di daerah itu.

Hal itu disampaikan Nyoman Suwirta saat menghadiri acara pelantikan, pengambilan sumpah janji dan bimbingan teknis badan ad hoc Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Klungkung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri

Kanya, Klungkung, Selasa (24/1)

Selain itu, Bupati Suwirta mengharapkan agar PPS dapat menjalankan kewajiban dan tugas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemilu dapat berjalan dengan damai, aman, dan menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas.

“Saya mengharapkan PPS melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan kedewasaan demokrasi di Klungkung,” kata dia.

Bupati Suwirta menyarankan kepada KPU untuk dapat membuat iklan pendek mengenai pemahaman tentang pemilu, serta membuat perencanaan pelaksanaan pemilu yang adil dan berkualitas.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan,

dalam laporannya yang dibacakan Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Dharmawan melaporkan bahwa terhitung hari ini tanggung jawab atas segala tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 berada di pundak semua anggota panitia pemungutan suara yang baru saja dilantik.

“Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan perpanjangan tangan panitia pemilihan Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota secara berjenjang hingga KPU RI. Sehingga wajib dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara hirarki berada dalam satu garis komando tegak lurus,” kata dia.

Lebih lanjut, kata dia, PPS dituntut bekerja secara profesional, mempunyai integritas, jujur, adil, loyalitas dan senantiasa menjaga netralitas dalam tahapan pemilu. (ant)

Pemkab Buleleng Perbaiki Jalan ke Pura Agar Perjalanan Ibadah Lancar

DINAS Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Buleleng, Bali, segera memperbaiki jalan menuju Pura Segara Rupek di Kawasan Taman Nasional Bali Barat Desa Sumberklampok Kecamatan Gerokgak memperlancar umat Hindu bersembahyang di pura tersebut.

"Dinas PUTR akan menuntaskan pekerjaan jalan sepanjang hampir sembilan kilometer tersebut pada 2023 ini," kata Kepala Dinas PUTR Buleleng, I Putu Adiptha Eka Putra di Buleleng, Jumat.

Ia mengatakan masyarakat selama ini banyak menyoroti jalan menuju Pura Segara Rupek selama bertahun-tahun sangat rusak, sangat tidak nyaman dalam perjalanan menuju salah satu pura bersejarah di Pulau Dewata itu.

"Untuk itu pada program pembangunan infrastruktur 2023 ini, utamanya terkait jalan ke pura

tersebut akan diperbaiki dengan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kurang lebih sebesar Rp15 miliar," kata dia.

Adapun program pengerjaan jalan menuju Pura Segara Rupek yang sebelumnya bertahap pengerjaan pada 2022 lalu. "Awal Februari ini kami lelang, target selesai Agustus 2023," ungkapnya.

Selain jalan menuju Pura Segara Rupek, Adiptha menambahkan akan mengerjakan proyek pengaspalan jalan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bengkala dengan campuran berbahan limbah plastik, yang akan dikerjakan bulan Maret selesai bulan Juli 2023.

"Hasil tes aspal yang dicampur bahan limbah plastik menambah umur ekonomis jalan, karena lebih tahan air," ungkap dia.

Kemudian pembangunan jembatan di Dusun Manuk Sesa Desa

Bebetin dengan anggaran Rp2 miliar ditargetkan selesai pada Juli dan pembangunan jaringan irigasi untuk penguatan pengairan Subak di Dusun Kusia Desa Bebetin sumber Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Selain Bebetin penguatan irigasi ini juga ada di Desa Ambengan, jadi 2 paket dengan dana pusat," ujar Putu Adiptha Eka Putra.

Selain itu, ia mema-

parkan bahwa prioritas tahun ini juga pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menelan biaya dari BKK Provinsi sebesar Rp8,5 miliar bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP).

"Inovasi Bapak Pj Bupati sangat luar biasa membangun MPP dan sekarang masih proses DED, Pebruari lelang pisik dan Agustus ditargetkan selesai," kata dia. (ant)



Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Buleleng I Putu Adiptha Eka Putra. ANTARA/HO-Kominfo Buleleng

Pemkab Jembrana akan Tingkatkan Sarana dan Sistem Pembinaan Atlet



Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyerahkan bonus kepada atlet peraih medali dalam Porprov Bali. ANTARA/HO-Pemkab Jembrana

PEMERINTAH Kabupaten Jembrana Bali berkomitmen memperbaiki fasilitas olahraga serta sistem pembinaan atlet untuk memajukan prestasi atlet-atlet yang berpartisipasi dalam kejuaraan-kejuaraan olahraga seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali.

Bupati Jembrana I Nengah Tamba di Jembrana, Rabu mengatakan pihaknya telah mendengar

keluhan-keluhan dari para atlet dan berjanji akan melakukan perbaikan.

"Salah satu yang akan diperbaiki adalah fasilitas terkait pembinaan atlet. Kami mendengar, mental atlet Jembrana sering jatuh saat berhadapan dengan atlet dari kabupaten yang fasilitasnya lebih maju," kata dia.

Selain itu Pemkab Jembrana

juga berupaya untuk terus memberikan dan meningkatkan jumlah bonus yang diberikan kepada para atlet yang berprestasi sebagai wujud dukungan dan apresiasi kepada atlet yang telah mengharumkan nama Kabupaten Jembrana.

Komitmen tersebut telah diwujudkan melalui penyerahan bonus kepada atlet-atlet Jembrana yang berhasil meraih medali dalam Porprov XV Bali senilai lebih dari Rp2 miliar.

"Pemberian bonus ini sebagai wujud komitmen Pemkab Jembrana terhadap perjuangan dan jerih payah atlet yang telah mengharumkan Jembrana lewat medali yang mereka raih," ujar Nengah Tamba.

Bupati juga menyoroti terkait dengan adanya atlet-atlet Jembrana yang pindah membela daerah lain. Menurutnya hal itu merupakan suatu hal yang lumrah dan

sulit dibendung karena berkaitan dengan profesionalitas.

"Di era sekarang, semua harus profesional. Termasuk kepindahan atlet, merupakan bagian dari sistem profesionalitas tersebut. Maka kami berjanji akan meningkatkan bonus, termasuk memperbaiki fasilitas dan sistem pembinaan atlet," tambah dia.

Ketua KONI Jembrana I Gede Ngunah Patriana Krisna menjelaskan pada Porprov XV Bali Kabupaten Jembrana berada di posisi ketujuh dalam klasemen umum dengan raih 17 medali emas, 28 medali perak dan 57 medali perunggu.

Atas capaian itu para peraih medali diganjar dengan bonus yang terdiri dari peraih medali emas cabang olahraga perorangan mendapatkan bonus Rp50 juta, ganda Rp60 juta dan beregu Rp70 juta. (ant)

DPRD Bali Setujui Raperda RTRWP 2023-2043

DPRD Provinsi Bali setelah melalui proses pembahasan yang panjang, akhirnya menyetujui dan menerima Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali Tahun 2023-2043 untuk kemudian dilanjutkan dengan tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.

"Kami berpendapat dapat menyetujui Raperda RTRWP Bali tahun 2023-2043 untuk dilanjutkan dengan tahap evaluasi di Kemendagri sesuai dengan tahap penyusunan RTRWP," kata Ketua Pansus Raperda RTRWP Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana di Denpasar, Senin.

Adhi Ardhana menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Bali dengan agenda Laporan Dewan terhadap Pembahasan Raperda tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2023-2043 sikap atau

Keputusan Dewan, dan Penda-pat Akhir Kepala Daerah.

Persetujuan terhadap Raperda RTRWP Bali tersebut ditandai dengan penandatanganan Persetujuan Bersama antara Gubernur Bali dan DPRD Provinsi Bali.

Ia mengatakan pembahasan tersebut sebelumnya melibatkan dua komisi yakni Komisi I dan III DPRD Bali.

"Pembahasan redaksional dan sinkronisasi dengan peraturan terbaru merujuk pada Raperda sebelum pembahasan lintas sektor dan sesudah pembahasan lintas sektor serta diterbitkannya persetujuan substansi, telah dilakukan pembahasan dan perbaikan," ujarnya.

Pada BAB I Ketentuan Umum, sesuai dengan arahan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia agar ditambahkan klausul Pemerintah Pusat, Ka-



Ketua Pansus Raperda RTRWP Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana dalam Sidang Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin (30/1/2023). ANTARA/HO-DPRD Bali.

wasan Lindung Geologi, Zona Tunda (Holding Zone) dan penghapusan klausul Kawasan Konservasi Maritim (KKM),

Yang dimaksud Kawasan Lindung Geologi adalah daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Sementara Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya

disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Adhi Ardhana menambahkan kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang RTR Kawasan Perkotaan Sarbagita direncanakan sebagai Zona L3/ P di Kawasan Teluk Benoa. (ant)

Universitas Pendidikan Ganesha Kukuhkan 17 Guru Besar



Rektor Undiksha, Prof. Dr. Nyoman Jampel saat memberikan sambutan saat pengukuhan 17 guru besar pada puncak acara dies natalis ke-30 di Auditorium Undiksha. ANTARA/HO-Undiksha

UNIVERSITAS Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Bali mengukuhkan 17 orang guru besar pada puncak kegiatan Dies Natalis ke-30 yang

dirayakan perguruan tinggi pendidikan tenaga kependidikan terbesar di Pulau Dewata tersebut.

"Ini adalah bagian besar dari

rencana Undiksha menuju Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) pada 2023-2024," kata Rektor Undiksha, Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd di Kabupaten Buleleng, Bali, Kamis.

Ia mengatakan dikukuhkannya 17 guru besar pada tahun ini merupakan kerja keras dari berbagai pihak. Salah satu upaya yang signifikan adalah pembentukan tim percepatan guru besar pada 2019.

"Kami menargetkan pada 2024 menambah lagi sekitar 25 guru besar. Tahun ini secara total sudah dikukuhkan sebanyak 24 guru besar pada berbagai jenjang keilmuan," ujar dia.

Rektor Jampel menegaskan Undiksha sebagai perguruan tinggi 30 besar di Indonesia menargetkan pada 2025 memiliki 100 guru besar dan tidak ada dosen

yang bergelar magister lagi.

"Jadi, semua dosen pada 2030 harus bergelar minimal doktor (S3) semua. Baik yang tamat di dalam negeri maupun menempuh pendidikan di luar negeri (PhD). Hal itu sudah dirumuskan dalam visi Undiksha menuju universitas unggul di Asia," ungkap dia.

Ia menambahkan salah satu faktor pendukung kemajuan pesat Undiksha pada bidang sumber daya manusia (SDM) adalah konsep harmoni yang dipakai sebagai landasan dan pijakan oleh semua pihak.

"Adapun konsep harmoni adalah mewujudkan kedamaian, saling peduli dan mengisi satu sama lainnya. Hal tersebut yang menjadi dasar kami bergerak untuk meraih kemajuan yang pesat," kata Rektor Jampel. (ant)

BI Bali: Digitalisasi Dukung Pengendalian Inflasi di Buleleng

KEPALA Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan berbagai upaya yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Buleleng disinkronkan dengan digitalisasi telah mendukung upaya pengendalian inflasi di kabupaten setempat.

Trisno di Denpasar, Jumat, mengatakan sebelumnya TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Buleleng telah menyelenggarakan pasar murah bertempat di Plaza Kuliner Pantai Penimbangan, Buleleng.

"Melalui pasar murah ini masyarakat akan mendapatkan potongan harga untuk membeli kebutuhan pokok penyumbang inflasi dengan melakukan pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)," ujarnya.

Melalui pasar murah itu sekaligus diharapkan mampu menjaga keterjangkauan harga dan

peningkatan penggunaan QRIS di Buleleng.

Untuk pengendalian inflasi di kabupaten yang terletak paling utara Pulau Bali itu, Trisno juga menyampaikan sejumlah rekomendasi seperti meningkatkan cakupan dan skala operasi pasar.

Kemudian meningkatkan peran perusahaan daerah (perusda) sebagai "oftaker" bahan pangan, pengendali harga dan ketersediaan pangan dan mengoptimalkan lahan tidur milik pemda dan perusda untuk lahan pangan hortikultura.

"Yang tidak kalah penting menyosialisasikan penggunaan media informasi harga pasar (televisi/running text) di pasar tradisional untuk meminimalkan informasi yang asimetris," kata Trisno.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pada bulan Desember 2022 Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, tercatat mengalami inflasi setinggi 0,59 persen dengan



Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho bersama Penjabat Bupati Buleleng I Ketut Lihadnyana saat menghadiri pasar murah di Plaza Kuliner Pantai Penimbangan Buleleng belum lama ini. ANTARA/HO-BI Bali.

Indeks Harga Konsumen sebesar 113,77.

Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2022 setinggi 4,63 persen sama dengan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2022 terhadap Desember 2021 atau YoY) tercatat setinggi 4,63 persen

Sementara itu sebelumnya Penjabat Bupati Buleleng I Ketut Lihadnyana dalam High Level

Meeting (HLM) TPID dan TP2DD mengatakan pemkab setempat bersama dengan BI akan terus melanjutkan dan meningkatkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah di Buleleng.

"Dengan adanya digitalisasi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas, akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat," ujarnya. (ant)

PLN Icon Plus Siap Dukung Pemprov Bali Wujudkan "Bali Smart Island"



Gubernur Bali Wayan Koster (tengah) berpose bersama dengan sejumlah pejabat PLN di Kantor Gubernur, Denpasar, Bali. ANTARA/HO-Humas PLN Bali

DIREKTUR Bisnis Konektivitas PLN Icon Plus, Sigit Witjaksono menyatakan siap mendukung pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan Bali smart island.

Hal itu disampaikan Sigit saat melakukan audiensi dengan Gubernur Bali Wayan Koster, Jumat (19/1) di Kantor Gubernur Bali,

Denpasar.

Sigit mengatakan PLN berkomitmen untuk ikut serta mendukung Bali menjadi daerah yang bisa memaksimalkan teknologi internet dan informasi guna mendorong kemajuan daerah.

"PLN Icon Plus, sebagai subholding Beyond kWh dari PLN, siap

mendukung sepenuhnya program dari pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini untuk mewujudkan Bali Smart Island (BSI). PLN Icon Plus siap mendukung Provinsi Bali menjadi daerah yang bisa memaksimalkan teknologi internet dan informasi guna mendorong kemajuan daerah" kata Sigit.

Sigit juga mengatakan berbagai upaya telah dilakukan PLN Icon Plus, diantaranya dengan memperluas layanan internet di seluruh kabupaten serta kota yang ada di Bali.

Hal itu, kata dia, sebagai bentuk upaya PLN untuk mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi masyarakat Bali, memenuhi kebutuhan Informasi dan teknologi komunikasi di lima proyek strategis Pemerintah Provinsi Bali tahun 2023, serta mendorong tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik.

"Saat ini PLN Icon Plus telah mendukung program Bali Smart

Island (BSI) di 1.060 titik yang tersebar di lima Kabupaten, yaitu Tabanan, Bangli, Jembrana, Buleleng, dan Karangasem. PLN Icon Plus juga siap mendukung proses digitalisasi di Bali dan bersinergi dengan program-program dari Pemerintah Provinsi Bali" kata Sigit.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik dukungan PLN Icon Plus yang telah berjalan selama ini dan berharap kedepan lebih banyak lagi program-program yang didukung oleh PLN Icon Plus demi terwujudnya Bali Smart Island.

"Terima kasih atas dukungan PLN Icon Plus dalam upaya mewujudkan Bali Smart Island. Banyak program yang bisa dikerjasamakan, ada Pusat Kebudayaan Bali, penataan kawasan suci Pura Agung Besakih, Pelabuhan Segitiga Emas (Sanur, Bias Munjul, Sampalan), Turypada Tower dan masih banyak lagi," kata Wayan Koster. (ant)

ITB STIKOM Bali Sabet Empat Penghargaan LLDikti Wilayah VIII

Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) STIKOM Bali menyabet empat penghargaan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII Bali-NTB atas sejumlah prestasi yang diraih.

“Penghargaan ini saya wajib dedikasikan kepada penggerak pendidikan di seluruh Bali khususnya sivitas akademika ITB STIKOM Bali karena kabar bahagia ini menjadi kepentingan bersama,” kata Rektor ITB STIKOM Bali Dr Dadang Hermawan, di Denpasar, Kamis.

Empat penghargaan yang diperoleh ITB STIKOM Bali yakni adalah perguruan tinggi swasta (PTS) dengan media sosial terbaik tahun 2022, dan PTS dengan peserta pada Program MSIB (Magang dan Studi Independen Bersertifikat) terbanyak tahun 2022.

Selanjutnya penghargaan sebagai PTS penerima hibah

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah proposal yang didanai terbanyak pada klaster binaan tahun 2022.

Terakhir sebagai perguruan tinggi swasta penerima Hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka tahun 2022.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala LLDikti Wilayah VIII Bali – NTB Dr Ir I Gusti Lanang Bagus Erotadi, ST, MT, di Denpasar pada Rabu (21/12).

“Dengan penghargaan ini, kita mampu membuktikan bahwa ITB STIKOM BALI jadi salah satu kampus swasta teknologi informasi terbaik di Bali dan NTB,” ujarnya.

ITB STIKOM Bali, lanjut dia,



Kepala LLDikti Wilayah VIII Bali – NTB Dr Ir I Gusti Lanang Bagus Erotadi, ST, MT, saat menyerahkan penghargaan yang diterima Rektor ITB STIKOM Bali Dr Dadang Hermawan, di Denpasar, Rabu (21/12/2022). ANTARA/HO-ITB STIKOM Bali.

yang selalu bisa untuk “up to date” dengan perkembangan zaman dan mencetak mahasiswa serta dosen berprestasi.

“Kami bertekad hadir untuk terus di tengah masyarakat Bali, terutama dalam dunia pendidikan dengan tetap mengutamakan budaya dan teknologi,” kata Dadang.

Pihaknya berharap prestasi yang telah diraih ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi segenap sivitas akademika untuk terus berkarya dan sukses pada masa mendatang, serta dapat melakukan pengabdian yang lebih baik kepada masyarakat. **(ant)**

KPU Bali Sebut PPS Perempuan di Bangli Lebih Dari 30 Persen



Pelantikan PPS KPU Denpasar di Denpasar, Bali, Selasa (24/1/2023). ANTARA/Ni Putu Putri Muliartari.

KETUA KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) perempuan di tingkat kelurahan/desa di Kabupaten Bangli telah melebihi target 30 persen dari keseluruhan.

“Beberapa daerah saya dorong untuk merekrut PPS perempuan dan sudah dilaksanakan, bahkan Kabupaten Bangli di atas 30 persen terisi kuotanya. Kita

senang karena sudah mendorong perempuan untuk berkontribusi di Pemilu 2024,” kata Lidartawan di Denpasar, Selasa.

Adapun total seluruh desa/kelurahan di Bali adalah 716, sementara di Kabupaten Bangli 72 dan membutuhkan masing-masing tiga PPS, sehingga totalnya 216 orang.

Lidartawan mengatakan selain muncul keterlibatan per-

empuan, kuota PPS juga banyak diisi anak muda dari usia 17 tahun dan hanya beberapa yang di atas 40 tahun.

Sementara itu untuk yang belum terpilih dianjurkan untuk mencoba kembali di pemilihan Pantarlih dan KPPS, sehingga hari ini secara serentak pelantikan hanya dilakukan terhadap anggota adhoc terpilih.

Lidartawan yang ditemui usai pelantikan PPS KPU Denpasar menyampaikan bahwa selanjutnya para anggota terpilih akan membantu tugas KPU selama 14 bulan dalam rangka Pemilu 2024.

“Sekarang dia (PPS) harus menyiapkan Pantarlih karena sebentar lagi akan melakukan cokolit, mereka membantu KPU kabupaten/kota dalam verifikasi faktual calon DPD misalnya,” ujarnya.

Untuk Denpasar sendiri, Ketua KPU Denpasar I Wayan Arsa Jaya menambahkan bahwa di

wilayah yang dipimpinnya telah terpilih 129 anggota dari 282 pelamar dengan usia termuda 18 tahun.

Mereka yang lolos tahap verifikasi administratif awal terdiri dari 85 orang perempuan atau 30,1 persen dan 69,9 persen laki-laki atau 69,9 persen.

“Kepada PPS kami menyampaikan informasi berkenaan dengan hal-hal secara administratif dalam proses pembentukan sekretariat PPS nanti. Mereka harus melaksanakan koordinasi dengan kepala desa/lurah, dan kami juga berikan informasi berkaitan dengan bagaimana menjadi penyelenggara yang berintegritas,” ujarnya.

Arsa mengakui bahwa sempat terjadi kendala dalam proses rekrutmen PPS di Kota Denpasar, hal tersebut didasari terbenturnya waktu pengumpulan berkas persyaratan dengan hari raya dan tahun baru. **(ant)**